PENERAPAN KEBIJAKAN DALAM PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA

Oleh: Endar Setiawan,

endar.es12@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Purworejo

Abstrak

Pendidikan kejuruan adalah bagian dari pendidikan yang mencetak individu agar supaya dapat bekerja pada kelompok tertentu. (Evan, 1978). Pendidikan kejuruan suatu program yang berada dibawah pendidikan tinggi yang diorganisasi menyiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja tertentu atau meningkatkan pekerjaan dalam dunia kerja. (Good, 1959). Pendidikan kejuruan bermaksud menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja tingkat menengah tertentu sesuai dengan tuntutan yang dipersyaratkan oleh dunia kerja, dan memberikan bekal kepada peserta didik untuk mengembangkan durinya. Oleh karena pendidikan kejuruan pada dasarnya mengarahkan peserta didik pada bidang tertentu melalui suatu organisasi, tentulah hasil pendidikan ini dapat dipakai sebagai bekal mencari kehidupan atau nafkah. Pendidikan ini dapat juga dinamakan : '*education for learning a living"*. Program dan kegiatan pembangunan pendidikan kejuruan diorientasikan pada tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu "tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota". Dalam rangka meningkatkan kualitas SMK, maka diperlukan kebijakan dalam pendidikan kejuruan untuk meningkatkan kualitas SDM lulusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan di masa ini.

Kata Kunci: ***Kejuruan ,kebijakan pendidikan,***

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan titik berat pembangunan dalam memasuki era globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang mampu membawa manusia lepas dari berbagai keterbelengguan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 11 Ayat 1 dan 2 yang menekankan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanapa diskriminasi.

Pendekatan yang selama ini dilakukan adalah cenderung lebih sentralistik baik dalam proses penentuan kebijakan maupun operasionalisasinya sehingga memberi dampak terbatasnya ruang partisipasi dan juga menurunnya kreativitas daerah. Pada akhirnya, kenyataan itu semakin memperburuk sistem pengelolaan sekolah pada hampir seluruh jenjang pendidikan yang ada termasuk pada tingkatan pendidikan kejuruan yang mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional (PP 29/1990). Di samping itu, secara nasional tertuang dalam Pasal 15 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, kemudian dikeluarkan Keputusan Mendikbud Nomor 0490/1992 tentang Kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) yang bertujuan meningkatkan kesesuaian program SMK dengan kebutuhan dunia kerja yang diusahakan dengan saling menguntungkan dan dengan dasar kebijakan Mendikbud tersebut dirumuskan kebijakan bersama antara Mendikbud dan Ketua Umum Kadin dengan nomor 0267a/U/1994 dan nomor 84/ KU/X/1994 tanggal 17 Oktober 1994 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tingkat Pusat disebut Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN), Tingkat Wilayah disebut Majelis Pendidikan Kejuruan Provinsi (MPKP), dan Tingkat Sekolah disebut Majelis Sekolah (MS)

Berkaitan dengan program kemitraan itulah, fenomena yang terjadi saat ini adalah kurikulum SMK baik rumpun teknologi dan industri maupun rumpun bisnis manajemen sebagai bagian dari mekanisme implementasi pendidikan sistem ganda kurang luwes dan sangat terstruktur. Tidak terkelolanya program pendidikan kejuruan dengan baik, di samping masih relatif kakunya sistem kurikulum yang dikembangkan oleh pihak manajemen SMK menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran tiap tahun.

Di samping itu, secara konseptual Djojonegoro (1999) menyatakan bahwa tolok ukur pendidikan kejuruan yang efisien adalah (a) mempersiapkan siswanya untuk jenis pekerjaan yang didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja dan (b) siswa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang telah dilatihkan. Konsideran seperti itu mengisyaratkan betapa pentingnya pengelolaan sistem pendidikan menengah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan, khususnya bagaimana mengaitkan

kompetensi lulusan dengan dunia industri sebagai sasaran dunia kerja alumni bersangkutan.

Dengan demikian, penerapan kebijakan pendidikan mempunyai kendala yaitu kompleksnya masalah yang dihadapi dalam proses penerapannya, baik dari segi sumber daya pelaksananya maupun mekanisme dan proses organisasi yang harus dilalui dan diberdayakan dalam dimensi kebijakan kemitraan.

PEMBAHASAN

A. Konsep Penerapan Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat,. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan ”kebijaksanaan”, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.

James E. Anderson menyebutkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu. (Sudiyono, 2007: 4). Harold D.Lasswell dan Abraham Kaplan juga menyebutkan kebijakan merupakan sebuah program yang diarahkan pada tujuan, nilai, dan praktek. Artinya kebijakan merupakan sebuah program yang disusun berdasarkan tujuan, termasuk nilai-nilai pembuat kebijakan dan fisibilitas dalam praktek. Dengan demikian kebijakan mengandung unsur fisibilitas teknis, sosial, dan politik. (Sudiyono, 2007: 3).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian proses dari suatu perencanaan dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga/instansi pemerintah yang berupa peraturan atau program untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

2. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, tetapi sering kali tidak kita pahami sepenuhnya. Pendidikan sudah dikenal sejak manusia lahir ke dunia ini karena dia lahir dari seorang ibu yang secara instingtif akan melindungi dan mengajari anaknya sehingga menjadi dewasa. Di dalam masyarakat modern atau yang telah maju, proses pendidikan tidak dapat lagi dilakukan secara terbatas oleh sang ibu atau keluarganya maupun masyarakat sekitarnya. Pendidikan telah menjadi tugas bersama di dalam masyarakat, sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang bernama sekolah atau pusat-pusat pelatihan yang proses pendidikannya dapat berjalan secara formal. Di dalam melaksanakan tugas pendidikan tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh stakeholder lembaga pendidikan itu dapat tercapai. (H.A.R. Tilaar, 2008: 16-18)

Kebijakan pendidikan itu berkenaan dengan pengaturan kehidupan dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan aspek sosialitas dari keberadaan manusia. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan tidak terlepas dari pertanyaan mengenai apakah manusia itu atau apakah hakikat manusia itu. Selanjutnya jawaban terhadap hakikat manusia akan membawa kita kepada pertanyaan apakah sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia ini dan bagaimana manusia itu dapat mewujudkan tujuan tersebut. Di sini kita tiba pada pertanyaan mengenai apakah sebenarnya proses pendidikan itu? Pengertian yang tepat mengenai hakikat proses pendidikan itu akan melahirkan berbagai kebijakan pendidikan. Salah satu makna dari proses pendidikan ialah melihat pendidikan sebagai salah satu proses pemberdayaan. (H.A.R. Tilaar, 2008: 18-19). Pemberdayaan diartikan sebagai usaha meningkatkan peran dan fungsi suatu sumber daya (Sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM)) menuju pemanfaatan yang tidak sia-sia (mubadzir secara duniawi dan ukhrowi). Sehingga

pemberdayaan merupakan kegiatan yang terpadu antara berbagai unsur satuan organisasi serta berbagai aspek kegiatan ber-penghidupan kedunian dan akherat

3. Penerapan Kebijakan

Penerapan kebijakan sebagaimana dikatakan oleh Grindle (Sudiyono, 2007: 77) bahwa : "sesungguhnya tidak semata – mata terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan". Suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Sehingga kebijakan hanya akan menjadi rencana bagus yang akan tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip lainnya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2009: 134) penerapan kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk menstransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa penerapan kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

4. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Kebijakan

Suatu penerapan kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Arif Rohman (2009: 147) menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam penerapan kebijakan yaitu:

a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat

atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.

b. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masingmasing. semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan.

c. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan,model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

KESIMPULAN

Untuk meningkatkan kualitas luaran lulusan SMK untuk masuk dunia kerja, maka perlu menerapkan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan kejuaruan. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian proses dari suatu perencanaan dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga/instansi pemerintah yang berupa peraturan atau program untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Di dalam melaksanakan tugas pendidikan tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh stakeholder lembaga pendidikan itu dapat tercapai. (H.A.R. Tilaar, 2008: 16-18). Kebijakan pendidikan itu berkenaan dengan pengaturan kehidupan dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan aspek sosialitas dari keberadaan manusia. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan tidak terlepas dari pertanyaan mengenai apakah manusia itu atau apakah hakikat manusia itu.

Penerapan kebijakan dalam pendidikan kejuruan merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan,

sehingga lulusan SMK dapat bersaing memasuki dinia kerja secara profesiaonal dan kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

Prastiyono. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif*. Jurnal Administrasi Publik

Wardiman Djojonegoro. 1998. *Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui SMK*. Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset.

http://globali. weebly.com/pemberdayaan.html (Diakses 14 april 2016)

Panji, Putu. 2009. *Pendidikan Kejuruan suatu Pilihan*. Tersedia http://kejuruansmkhendra.blogspot.com/ (diakses 14 april 2016)

Suyitno, S. (2015). PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO-VISUAL UNTUK MATERI SISTEM PEMINDAH TENAGA OTOMOTIF. *Auto Tech: Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Muhammadiyah Purworejo*, *5*(2).

Suyitno, S. (2016). Pengembangan Multimedia Interaktif Pengukuran Teknik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, *23*(1), 101-109.

Suyitno, S. (2015). Pengukuran Teknik Otomotif. K-Media. Yogyakarta